

Implementasi Kebijakan Program MBKM Pada Program Studi Pendidikan Sejarah

Mita Lestari^{1*}

Heri Susanto²

Melisa Prawitasari³

^{1*,2,3} Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

mitalestari038@gmail.com^{1*)}

iniherisusanto@gmail.com²⁾

melisa.prawita@gmail.com³⁾

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program MBKM dan faktor yang mendukung dan menghambat implementasi MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, studi dokumen. Penentuan sumber data menggunakan teknik *purposive sampling*. Pada uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Teknik analisis data menggunakan acuan dari Miles dan Huberman, proses analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: implementasi program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM sudah berjalan cukup baik walaupun masih menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi, dan faktor yang mendukung meliputi minat tinggi mahasiswa, dukungan dari dosen dan program studi, serta kemandirian program studi dalam mengelola program MBKM. Faktor yang menghambat seperti kurangnya indikator evaluasi yang jelas, panduan yang belum lengkap, dan kendala dalam penyesuaian jadwal. Simpulan penelitian ini bahwa implementasi program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM berjalan sudah dengan cukup baik, dimulai dari dukungan oleh program studi dan minat mahasiswa yang meningkat, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut yang perlu diatasi. Kontribusi dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dalam pelaksanaan MBKM, serta rekomendasi untuk perbaikan ke depan.

Keywords: Implementasi, Kebijakan MBKM, ULM.

Published by:



Copyright © 2024 The Author (s)

This article is licensed



Implementasi Kebijakan Program MBKM Pada Program Studi Pendidikan Sejarah

1. Pendahuluan

Dunia Pendidikan di awal tahun 2020 menjadi tahun yang sangat istimewa karena bergulirnya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Fenomena ini menghasilkan tantangan luar biasa dalam ranah implementasinya. Konsep MBKM memberi kebebasan dan otonomi kepada Lembaga Pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mahasiswa sukai (Kemendikbudristek, 2020). Gagasan Merdeka Belajar Kampus Merdeka disusun oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dengan mengutamakan implementasi nilai-nilai karakter supaya daya pikir, kreativitas setiap pelajar berkembang (Savitri, 2000). Adanya kebebasan yang hendak diraih dalam MBKM ini menambah imun setiap kampus untuk terus wmenjadi lebih kampus yang lebih baik lagi dengan mencetak lulusan memiliki nilai karakter, daya pikir, dan kreativitas berkembang (Simatupang & Yuhertiana, 2021).

Kebijakan MBKM ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasukidunia kerja. MBKM memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Perguruan Tinggi diharapkan berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi Program MBKM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada delapan Program MBKM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa Merdeka, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Kegiatan Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, dan (8) Proyek Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik. Hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3, 2020) tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Salah satu kunci keberhasilan dari implementasi Kebijakan MBKM adalah mengupayakan agar proses pembelajaran di Perguruan Tinggi lebih otonom dan fleksibel (Yusuf & Arfiansyah, 2021), sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.

Program MBKM secara implisit merupakan respon Kemdikburistek dalam rangka

menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Pelaksanaan MBKM melalui program kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri sebagai salah satu cara meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa. Bahkan dalam Buku Panduan MBKM dikatakan bahwa kerjasama dengan mitra juga akan melibatkan dosen dalam pembimbingan maupun aktivitas akademik untuk peningkatan kompetensinya. Inovasi pembelajaran juga harus dilakukan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan memecahkan permasalahan, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kepeduliannya melalui berbagai metode pembelajaran inovatif di antaranya pembelajaran pemecahan kasus dan pembelajaran kelompok berbasis proyek. Arah pengembangan kurikulum dan pilihan mitra kerjasama untuk implementasi MBKM juga menjadi pertimbangan program studi dalam mempersiapkan akreditasinya baik nasional maupun internasional.

Kemendikbudristek, (2020) kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) telah diimplementasikan secara luas di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dengan partisipasi lebih dari 800 pimpinan perguruan tinggi, lebih dari 14.000 dosen, dan 124.000 mahasiswa dari berbagai institusi, baik negeri maupun swasta. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan kemandirian dan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Namun, evaluasi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek menunjukkan bahwa masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program ini, seperti:

1. Desain Kurikulum: Masih terdapat kesulitan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan prinsip MBKM, yang berbasis capaian pembelajaran dan bersifat fleksibel serta adaptif.
2. Ketersediaan Dosen Pembimbing: Kurangnya dosen yang siap dan bersedia membimbing mahasiswa dalam program-program MBKM.
3. Ketersediaan Program dan Pendanaan: Terbatasnya program-program MBKM yang tersedia serta masalah pendanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program ini.

Meskipun banyak studi telah menyoroti manfaat dan tantangan dalam implementasi MBKM, penelitian ini menemukan bahwa masih ada kurangnya pemahaman yang mendalam

mengenai strategi efektif untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di tingkat program studi, khususnya dalam bidang Pendidikan Sejarah. Penelitian ini juga mengungkap bahwa ada perbedaan tingkat kesiapan dan penerimaan antara berbagai program studi dalam mengadopsi kebijakan MBKM.

Penelitian ini fokus pada implementasi program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, dengan memberikan perhatian khusus pada dinamika lokal yang mungkin mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam beberapa aspek:

1. Identifikasi Kendala Spesifik: Mengidentifikasi kendala spesifik yang dihadapi oleh Program Studi Pendidikan Sejarah dalam mengimplementasikan MBKM, seperti tantangan dalam desain kurikulum dan ketersediaan dosen pembimbing.
2. Strategi Pengembangan Kurikulum: Menyediakan wawasan tentang bagaimana program studi dapat mengembangkan kurikulum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Kolaborasi dan Kerja Sama: Menyoroti pentingnya kolaborasi dengan mitra eksternal untuk mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan.

Dengan demikian, penelitian ini berperan penting dalam mengisi kekosongan literatur yang ada, khususnya terkait dengan implementasi MBKM di bidang pendidikan sejarah, serta memberikan rekomendasi praktis bagi program studi lain yang mengalami tantangan serupa.

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan program studi dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Kata implementasi ialah bagaimana proses menerapkan suatu objek yang memiliki makna terhadap sesuatu (Jamil, 2019). Dengan kata lain implementasi ialah suatu program bersifat subjektif yang berasal dari tokoh yang memiliki pendapat mengenai berbagai obyek atau hal-hal berdasarkan perjalanan dan pengalaman pribadi setelah melakukan observasi terhadap suatu fenomena.

Setelah melakukan observasi awal dan hasilnya Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM mendukung implementasi program MBKM. Karena MBKM merupakan kebijakan Kemendikbud yang turun ke Universitas kemudian ke Fakultas kemudian di implementasikan oleh Program Studi sebagai ujung tombak berjalannya program tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh berbagai institusi pendidikan tinggi, termasuk Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat (FKIP ULM). Hal ini disebabkan oleh keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan program MBKM yang masih perlu ditingkatkan, proses pemberian kredit untuk mata kuliah MBKM yang masih perlu ditinjau

ulang, dan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah belum sepenuhnya terstruktur.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah-masalah manusia dan sosial. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan permukaan dari sebuah realitas, sebagaimana penelitian kuantitatif. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik, penelitian kualitatif menggunakan pengumpulan data, analisis, untuk kemudian diinterpretasikan (Fadli, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif untuk menginvestigasi Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sehingga dapat menjelaskan apakah pelaksanaan MBKM tersebut di program studi Pendidikan Sejarah sudah berjalan baik atau belum dan apa saja faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaannya. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara kegiatan pengamatan atau observasi, wawancara dengan narasumber, dan juga dokumentasi secara langsung objek yang diteliti.

Penelitian ini berlokasi di Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Jl. Brigjen Hassan Basry, Pangeran, Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya surat izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan di semester ganjil tahun ajaran 2023/2024. 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangung.

Informan pada penelitian ini terdiri dari Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM, dan seluruh mahasiswa aktif tahun 2019-2022 Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP ULM yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penggunaan sumber data mempergunakan *purposive sampling* dengan mempertimbangkan, seperti narasumber yang mempunyai pengetahuan

mengenai pembahasan yang tengah diteliti.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kredibilitasnya serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan metode penelitian kualitatif oleh peneliti, yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan banyak sumber informasi melalui berbagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian ini memiliki tingkat kebenaran yang lebih realistis yang bersifat jamak.

Pada studi kualitatif, data yang diperoleh dapat dinyatakan sah apabila tidak ditemukan ketidakcocokan data yang diungkapkan oleh peneliti dengan fakta sebenarnya dari objek yang peneliti teliti di lapangan ([Sugiyono, 2013](#)). Menjamin keabsahan data ini akan diterapkan triangulasi teknik. Penggunaan teknik ini bertujuan menguji validitas data dengan membandingkannya terhadap sumber yang sama melalui teknik yang beda ([Sugiyono, 2016](#)).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sarna, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut ([Sugiyono, 2013](#)).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sarna dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda ([Sugiyono, 2013](#)).

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2013).

3. Hasil dan Pembahasan

Program Studi Pendidikan Sejarah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) memiliki komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan berbagai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. MBKM merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk memilih dan merancang program pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Dalam konteks Program Studi Pendidikan Sejarah di FKIP ULM, beberapa program MBKM telah dijalankan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal, relevan, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui studi dokumen didapatkan beberapa informasi bahwa setiap perguruan tinggi wajib memfasilitasi program MBKM untuk mahasiswa, baik untuk MBKM *Flagship* maupun MBKM Mandiri. Program MBKM *Flagship* adalah kegiatan MBKM yang dinaungi secara langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, Program MBKM Mandiri merupakan program kerjasama MBKM Jenis Program MBKM *Flagship* dan Mandiri yang diselenggarakan melalui perjanjian kerjasama antar perguruan tinggi atau antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Setiap bentuk kegiatan MBKM yang telah diselesaikan mahasiswa, baik *Flagship* maupun Mandiri dapat dikonversi ke sejumlah sks tertentu sesuai dengan kurikulum dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perguruan tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharapkan mampu menciptakan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kompetensi mahasiswa dirancang menyesuaikan perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang Hak Belajar Mahasiswa di luar Program Studi berubah dengan cepat. Kurikulum perguruan tinggi dituntut lebih inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Gambar 1. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka



Sumber: Kemdikbudristek, (2020)

Salah satu Kebijakan MBKM adalah “Hak belajar 3 (tiga) semester di luar Program Studi” yang telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Mahasiswa bebas belajar dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti magang/praktik kerja di industri atau tempat kerja lainnya, melakukan kegiatan wirausaha, menginisiasi proyek kemanusiaan, mengikuti pelatihan militer, dan lain sebagainya. Meskipun sangat direkomendasikan, namun hak tersebut bersifat opsional untuk diambil atau tidak oleh mahasiswa. Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi: 1) Pertukaran Mahasiswa Merdeka; 2) Magang/Praktik Kerja; 3) Asistensi di Satuan Pendidikan; 4) Penelitian Riset; 5) Proyek Kemanusiaan; 6) Kegiatan Wirausaha; 7) Studi Independen; 8) Membangun Desa/KKN Tematik.

Program Studi Pendidikan Sejarah merancang kurikulumnya dengan pendekatan berbasis MBKM. Proses ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip MBKM ke dalam struktur pembelajaran, menciptakan kurikulum yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk menentukan jalur pendidikan sesuai dengan minat dan tujuan pribadi mereka. Dasar Hukum pelaksanaan kurikulum MBKM merupakan landasan utama dalam implementasi program ini. Dasar Hukum tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi. Permendikbud ini menjadi acuan normatif yang mengatur standar dan ketentuan pelaksanaan pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya implementasi kurikulum MBKM. Dengan merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, institusi pendidikan tinggi, termasuk Program Studi Pendidikan Sejarah,

memiliki dasar hukum yang jelas untuk melaksanakan kurikulum MBKM. Hal ini menegaskan bahwa implementasi MBKM tidak hanya didasarkan pada inisiatif internal perguruan tinggi, tetapi juga diakui dan diatur secara resmi oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti diketahui bahwa Program Studi Pendidikan Sejarah menerapkan Program MBKM dengan skema yang mengedepankan keleluasaan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi pada PT yang sama, luar PT, serta melibatkan bentuk pembelajaran pengganti perkuliahan. Mengacu pada hal ini, Program Studi Pendidikan Sejarah melaksanakannya dengan skema berikut.

1. Mahasiswa dipersilakan memilih program MBKM dengan maksimal 3 semester atau setara 40 sks. Program studi mendukung dan memfasilitasi mahasiswa dalam bentuk pengakuan atas keberhasilan mahasiswa mengikuti program MBKM.
2. Mata kuliah yang ditawarkan diutamakan memiliki CPL sama atau relevandengan program studi atau mendukung ketercapaian profil lulusan program studi.
3. Setiap memprogram mata kuliah, mahasiswa mengkonsultasikannya kepada dosen penasehat akademik.
4. Program studi melakukan monitoring perkuliahan dari mahasiswa yang memprogram MBKM dan melakukan pengakuan sks dalam tiga bentuk, yakni (a) rekognisi atau pengakuan mata kuliah yang tidak terdapat dalam kurikulum program studi, namun mendukung ketercapaian profil lulusan, bentuk ini berlaku jika tidak ada relevansi antara program MBKM yang diikuti mahasiswa dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi; (b) konversi atau mengakui mata kuliah dengan CPL relevan; dan (c) *blended* atau pencampuran antara rekognisi dan konversi, sebagian mata kuliah yang memiliki CPL relevan akan dikonversikan dengan mata kuliah program studi, mata kuliah lainnya yang tidak relevan dengan CPL namun mendukung ketercapaian profil lulusan akan langsung diakui sebagai mata kuliah pencapaian program MBKM.

Hasil wawancara dengan Bapak Helmi Akmal, M.Pd., selaku Admin dari Program Studi Pendidikan Sejarah diketahui bahwa, Program Studi Pendidikan Sejarah memutuskan untuk memilih 5 (lima) program MBKM yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan mendukung profil lulusan Program Studi Pendidikan Sejarah menunjukkan pendekatan yang terencana dan terstruktur dalam mengintegrasikan MBKM ke dalam kurikulum. Hal ini juga mencerminkan kesadaran akan pentingnya menyelaraskan program MBKM dengan visi dan misi Program Studi Pendidikan Sejarah, serta tujuan pembentukan lulusan yang diinginkan. 5 (lima) program MBKM yang direkomendasikan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah kepada

mahasiswanya, yaitu 1) Asistensi mengajar di satuan pendidikan; 2) Magang atau praktik kerja; 3) Studi independen; 4) Penelitian atau riset; 5) Pertukaran mahasiswa merdeka. Dalam hasil wawancara ini, terungkap bahwa rekomendasi program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah didasarkan pada kesesuaian dengan profil lulusan yang berhubungan langsung dengan bidang keilmuan. Meskipun lima program MBKM yang direkomendasikan oleh program studi, tetapi mahasiswa diizinkan untuk mengikuti tiga program MBKM lainnya, seperti Proyek Kemanusiaan, Membangun Desa, dan Kewirausahaan. Namun, saat ini, program studi belum dapat memberikan pengakuan resmi terhadap keberhasilan mahasiswa yang mengikuti tiga program MBKM tersebut. Rekomendasi resmi lebih cenderung pada lima program MBKM yang telah direkomendasikan sebelumnya, karena lebih sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran Program Studi Pendidikan Sejarah.

Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Melisa Prawitasari, M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah. Beliau menjelaskan bahwa Program Studi Pendidikan Sejarah menegaskan tidak membatasi pilihan mahasiswa terkait program MBKM yang ingin diikuti. Namun, untuk memastikan kebaikan mahasiswa, program studi memberikan arahan yang sesuai dengan fokus utama Program Studi Pendidikan Sejarah. Dengan demikian, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan mahasiswa dan kesesuaian dengan kriteria lulusan dan visi Program Studi Pendidikan Sejarah.

Implementasi Program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah dapat dinyatakan berjalan dengan cukup baik walaupun masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Koordinator Program Studi Pendidikan Sejarah, Ibu Melisa Prawitasari, M.Pd., mengatakan:

“Sudah berjalan cukup baik walaupun masih ada beberapa kendala yang perlu diatasi. Sekarang kami dari program studi sudah membentuk Tim MBKM yang diharapkan nantinya semua pelaksanaan program MBKM lebih terkontrol, lebih tertata daripada sebelumnya sehingga tingkat peminat dari mahasiswa pun lebih tinggi.” (Wawancara, 18/12/2023).

Ibu Fitri Mardiani, M.Pd., selaku dosen Program Studi Pendidikan Sejarah juga mengatakan:

“Secara umum secara keseluruhan sudah cukup bagus, melihat lumayan banyak mahasiswa yang ikut serta dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Walaupun masih ada beberapa kendala dan ada beberapa hal yang perlu dioptimalkan, jika kita lihat prospek ke depannya akan banyak kesempatan-kesempatan atau peluang terkait pengalaman mahasiswa yang akan didapat ketika berada di lapangan secara langsung.” (Wawancara, 13/12/2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, implementasi Program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah menunjukkan perkembangan yang positif sehingga dapat dikatakan sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih menghadapi beberapa tantangan yang perlu

diselesaikan. Pembentukan Tim MBKM oleh program studi menjadi langkah yang diharapkan dapat meningkatkan kontrol dan pengelolaan program secara lebih terstruktur, sehingga dapat meningkatkan minat partisipasi mahasiswa. Hal ini selaras dengan teori (Setiawan, 2004) yang berpendapat bahwa pengertian implementasi adalah perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan serta tindakan dengan tujuan untuk menggapainya juga diperlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.

Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat 7 dari 10 mahasiswa juga sepakat mengatakan bahwa pelaksanaan program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah sudah berjalan dengan cukup baik dengan catatan ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Sehingga dapat disimpulkan sekitar 70% mahasiswa setuju bahwa implementasi program MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini berkaitan dengan peningkatan jumlah mahasiswa yang berpartisipasi menunjukkan bahwa program MBKM telah berhasil menarik minat mahasiswa dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan tingginya antusiasme mahasiswa terhadap program ini. Meskipun demikian, masih terdapat kendala- kendala yang perlu diatasi dan aspek-aspek yang perlu dioptimalkan untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas program ini. Prospek ke depannya menjanjikan banyak kesempatan dan peluang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang berharga di lapangan, sehingga perbaikan yang terus-menerus dalam implementasi program ini akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan akademik dan profesional mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah.

Program Studi Pendidikan Sejarah telah berhasil mengirimkan sebanyak 64 mahasiswa aktif tahun 2019 hingga 2022 untuk berpartisipasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang direkomendasikan oleh program studi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 mahasiswa berpartisipasi dalam program Asistensi Mengajar, 8 mahasiswa mengikuti Kampus Mengajar, 1 mahasiswa terlibat dalam program Magang/Praktik Kerja, dan 7 mahasiswa mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Menariknya, 3 dari 64 mahasiswa ini berhasil mengikuti lebih dari satu program MBKM, dua di antaranya terlibat dalam dua program, sementara satu mahasiswa lainnya sukses berpartisipasi dalam tiga program MBKM. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Program Studi Pendidikan Sejarah dalam mendukung dan memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang beragam dan komprehensif di luar kampus.

Selain manfaat langsung bagi mahasiswa, program MBKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah sasaran melalui salah satu programnya, yakni Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan. Dengan keterlibatan mahasiswa

dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi pembelajaran, mereka membawa ide-ide segar dan inovatif ke dalam lingkungan pendidikan. Strategi pembelajaran ini dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara siswa dan pendidik, dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Susanto, 2014).

Pengalaman yang diperoleh mahasiswa mengikuti program MBKM menunjukkan bagaimana salah satu programnya, yaitu asistensi mengajar tidak hanya mempersiapkan mahasiswa pendidikan secara teoritis tetapi juga memberikan mereka bekal dengan pengalaman, keterampilan, dan jaringan sebagai guru yang diperlukan untuk berkontribusi secara efektif dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pendidikan, guru berperan penting menjalankan pembelajaran dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai serta membimbing siswa. Pendidikan merupakan proses pengendalian secara sadar yang menghasilkan berupa perilaku melalui proses pembelajaran di lingkungan sekolah (Prawitasari & Susanto, 2021)

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian di atas adalah program MBKM yang dilaksanakan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah menawarkan beragam kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik dan profesional mereka. Program Studi Pendidikan Sejarah memberikan rekomendasi lima program MBKM yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan mendukung profil lulusan menunjukkan kesadaran akan pentingnya menyelaraskan MBKM dengan visi, misi, dan tujuan pembentukan lulusan yang diinginkan oleh program studi. Lima program yang direkomendasikan, yaitu Asistensi Mengajar, Magang atau Praktik Kerja, Studi Independen, Penelitian atau Riset, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Meskipun hanya lima program MBKM yang direkomendasikan, mahasiswa masih diizinkan untuk mengikuti tiga program MBKM lainnya, seperti Proyek Kemanusiaan, Membangun Desa, dan Kewirausahaan. Namun, pengakuan resmi terhadap keberhasilan mahasiswa yang mengikuti tiga program MBKM tersebut masih belum dapat diberikan oleh program studi. Oleh karena itu, rekomendasi resmi lebih cenderung pada lima program MBKM yang telah direkomendasikan sebelumnya, karena lebih sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran Program Studi Pendidikan Sejarah. Implementasi MBKM di Program Studi Pendidikan Sejarah telah berjalan dengan cukup baik walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Program MBKM ini telah memberikan mereka pengalaman belajar yang beragam dan memberikan banyak manfaat signifikan. Para mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah telah berhasil lolos mengambil bagian dalam

program Asistensi Mengajar, Magang atau Praktik Kerja, dan Pertukaran Mahasiswa Merdeka, yang membuka peluang bagi mereka untuk mengeksplorasi minat akademik mereka, dan merasakan pertukaran budaya di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Kemudian disarankan perlu dilakukannya upaya untuk mengatasi tantangan dalam implementasi MBKM, seperti kurangnya indikator evaluasi yang jelas dan kendala dalam penyesuaian jadwal. Penyempurnaan panduan dan penambahan indikator evaluasi yang lebih terukur akan membantu memastikan bahwa mahasiswa dapat memperoleh manfaat optimal dari program MBKM. Selain itu, koordinasi antara program studi dan mahasiswa dalam penyesuaian jadwal menjadi kunci untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Jamil, M. M. (2019). Optimalisasi Model ARCS Dalam Pembelajaran Saintifik untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik pada Peminatan Mata Pelajaran Geografi di Kelas Matematika Ilmu alam. *IJIS Edu: Indonesian Journal of Integrated Science Education*, 1(1), 7–24.
- Kemendikbudristek. (2020). Buku Panduan MBKM. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek.
- Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Retrogresi Penggunaan Media Daring dalam Pembelajaran Sejarah Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 173–177.
- Simatupang, E., & Yuhertiana, I. (2021). Merdeka Belajar Kampus Merdeka Terhadap Perubahan Paradigma Pembelajaran pada Pendidikan Tinggi: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(2), 30–38.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Susanto, H. (2014). *Seputar Pembelajaran Sejarah; Isu, Gagasan dan Strategi Pembelajaran*. Aswaja Pressindo.
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “Merdeka Belajar” Dalam Pandangan Filsafat Konstruktivisme. *Al-Murabbi: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120–133.